

ABSTRAK

Nona Pricillia Ohei (01657200032)

KEWENANGAN PENYIDIK POLRI MELAKUKAN PENYITAAN ASET LAIN TERSANGKA BERBASIS *VALUE BASED SYSTEM* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Untuk mewujudkan Pembangunan Nasional, diperlukan adanya keuangan negara yang memadai. Keuangan negara merupakan sumber pembiayaan dalam pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Namun, kemudian dikorupsi oleh oknum tersangka dengan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian keuangan negara. Tersangka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan mengganti kerugian keuangan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan yang dihadapi hukum dalam upaya pengembalian kerugian negara serta menemukan suatu formulasi hukum berupa pembaharuan hukum pidana berkenaan dengan penguatan landasan hukum kewenangan penyidik Polri untuk menyita aset lain guna pengembalian kerugian keuangan negara. Penelitian ini menggunakan tiga teori, yaitu Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*), Teori Pidana, Teori Hukum Progresif, serta EAL sebagai metode analisis. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan dukungan yuridis empiris, dan menggunakan *statute approach* yang dipadukan dengan *case approach*.

Temuan hasil penelitian bahwa kewenangan Penyidik Polri dalam menyita aset milik Tersangka Tindak Pidana Korupsi berdasarkan pada ketentuan formil Pasal-pasal Penyitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP, sedangkan ketentuan materiil diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. Aset yang dapat disita terbatas pada aset yang berhubungan dengan tindak pidana yang disangkakan, sedangkan penyitaan aset lain milik Tersangka tidak diatur.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, diperoleh konsep pengaturan yang ideal yang merupakan pembaharuan hukum pidana sebagai tujuan pembangunan nasional untuk mensejahterakan rakyat, yaitu kewenangan Penyidik Polri untuk menyita aset lain milik Tersangka guna pengembalian kerugian keuangan negara. Pengaturan yang ideal tersebut terdapat syarat dan mekanisme dalam melaksanakan penyitaan aset lain milik tersangka. Dalam tahap penyidikan tindak pidana korupsi, sistem penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik tidak hanya sebatas aset tindak pidana (*property based system*), tetapi juga aset lainnya yang tidak terkait tindak pidana yang disangkakan guna pengembalian kerugian keuangan negara (*value based system*).

Kata kunci: Tindak Pidana Korupsi, Kerugian Keuangan Negara, Penyitaan Aset lain, Pengembalian Kerugian Negara.

ABSTRACT

***THE INDONESIAN POLICE INVESTIGATOR AUTHORITY
TO CONFISCATE OTHER ASSETS OF SUSPECT
ON VALUE-BASED SYSTEM IN CORRUPTION CRIMES***

Nona Pricillia Ohei

Faculty of Law, Pelita Harapan University, Indonesia

Email : pricillianona@gmail.com

In order to develop the country and bring prosperity to its citizens, Indonesia establish state financial system, including management of national income and expenditure. In this regard, the act of corruption brought losses to the national fund. Legally, those who committed to corruption have to be responsible for their act and replace the loss of national funds. This research aims to observe and analyse legal problems in the effort to cover up the countries loss due to corruption practices. In fact, the existing criminal laws unable the police investigators to confiscate other assets owned by wrong ones to replace the countries monetary loss. This normative legal research uses the Statute Approach combined with the Case Approach. This research finding shows that the power of the Indonesian Police Investigators on confiscating assets from suspects that commit corruption is based on the formal requirements as stipulated in the Criminal Procedure Code. It is defined in the Eradication of the fact of Corruption Law 1999 (IDN) that assets allowed to be confiscated is limited to assets related directly to the suspected criminal act. In this respects, confiscation of other assets owned by the suspect is not regulated. It is advisable therefore to amend the criminal law in order to facilitate Police Investigators to confiscate the “other” assets to replace the countries financial loss (value based system).

Key word: *Corruption, Countries Monetary Loss, Confiscation Other Assets, Replace the countries monetary loss.*